TL 4391

GERAKAN REKONSILIASI DAN PERSATUAN RAKYAT
TIMOR TIMUR
(GRPRTT)

PERNYATAAN SIKAP

KAMI, ADALAH RAKYAT TIMOR TIMUR, YANG BERDASARKAN POLITIK DEKOLONISASI PORTUGIS TELAH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI.

AKAN TETAPI, BERLANDASKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR: 7 TAHUN 1976 TANGGAL 17 JULI 1976 TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR, KAMI TELAH "DINYATAKAN" MENJADI BAHAGIAN DARI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA.

MESKIPUN DEMIKIAN ADANYA, DENGAN RESOLUSI NOMOR: 32/34 TAHUN 1977, PBB MENOLAK INTEGRASI TERSEBUT, BAHKAN SAMPAI HARI INI, PBB DAN KOMUNITAS INTERNASIONAL MASIH TETAP MENUNTUT AGAR KAMI RAKYAT TIMOR TIMUR DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI.

DI DALAM ALUR POLITIK DEKOLONISASI DAN DI ANTARA DUA KUTUB SIKAP YANG BERTOLAK BELAKANG ITU, SAMPAI HARI INI, KAMI RAKYAT TIMOR TIMUR MASIH "MERASA" BERADA DI DALAM PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI TERSEBUT. DAN, SADAR ATAU TIDAK SADAR, "SEPERTINYA" DALAM BAHASA ATAUPUN SIKAP, INDONESIA MENGAKUI PERASAAN KAMI ITU.

SATU KENYATAAN EMPIRIK YANG SULIT SEKALI KITA PUNGKIRI, BAHWA PERASAAN RAKYAT TIMOR TIMUR ITU TERUS MENGALIR DAN BERGOLAK DI ANTARA DUA KUTUB SIKAP TADI. ALIRAN DAN PERGOLAKAN PERASAAN TERSEBUT - SEBAGAIMANA KITA SEMUA KETAHUI - SAMPAI HARI INI MASIH TETAP MEMBONCENG PENDERITAAN DAN KORBAN JIWA DAN HARTA YANG TAK TERHITUNG NILAINYA.

KARENA PENDERITAAN DAN PENGORBANAN RAKYAT TIMOR TIMUR ITU TERUS BERLANGSUNG, DAN, KITA TIDAK TAHU KAPAN BERBAGAI PROSES PENDEKATAN AKAN PENYELESAIAN MASALAH TIMOR TIMUR DAPAT MENJANJIKAN TITIK TERANGNYA, MAKA DALAM KAPASITAS KAMI SELAKU PELAKU SEJARAH INTEGRASI/PERJUANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI BELENGGU PENJAJAHAN, KAMI MENGAMBIL INISIATIF DAN SEPAKAT MEMBENTUK SEBUAH GERAKAN YANG KAMI NAMAKAN GERAKAN REKONSILIASI DAN PERSATUAN RAKYAT TIMOR TIMUR (GRPRTT).

MESKIPUN PEDAS BERBAGAI ARGUMEN YANG DIKELUARKAN GRPRTT INI, NAMUN GRPRTT BUKANLAH ANTI-INTEGRASI YANG TELAH MENJADI SATU FAKTA TERSENDIRI SELAMA LEBIH DARI 22 TAHUN TERAKHIR INI; BUKAN PULA ANTI-PERJUANGAN PRO-KEMERDEKAAN YANG DIHEMBUSKAN OLEH RAKYAT TIMOR TIMUR. GRPRTT ADALAH SEBUAH GERAKAN MORAL DAN POLITIK YANG MENYADARI BAHWA FAKTOR UTAMA YANG MENGHAMBAT PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI ATAU PENYELESAIAN MASALAH TIMOR TIMUR, IALAH EGOISME POLITIK, PERPECAHAN DI KALANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR, KETIDAKJUJURAN DAN KEKERASAN/PERANG. SEHINGGA GRPRTT LAHIR DAN BERKEMBANG DENGAN KOMITMEN MEREALISASIKAN SECARA NYATA .....

P/ PEDRO ALVES

SECARA NYATA REKONSILIASI DAN PERSATUAN DI ANTARA RAKYAT TIMOR TIMUR DAN MEMBANTU PIHAK PBB, PORTUGAL DAN INDONESIA MENCARI PENYELESAIAN ATAS MASALAH TIMOR TIMUR MELALUI SEBUAH DIALOG HORIZONTAL DAN VERTIKAL, TANPA HARUS MENGGUGURKAN HAK RAKYAT TIMOR TIMUR UNTUK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI.

TERNYATA, KARENA IDEALISME DAN KONSEP MORAL DAN POLITIK GRPRTT ITU, PIHAK PEMERINTAH DAERAH TK I TIMOR TIMUR TELAH MENUNJUKKAN PERASAAN ANTIPATI DENGAN MENYEBARKAN ISSUE BAHWA GRPRTT ADALAH INKONSTITUSIONAL, ANTI-REPUBLIK DAN PENGACAU, SEHINGGA HARUS DIBUBARKAN DAN GEMBONG-GEMBONGNYA HARUS DIHUKUM. IRONISNYA, UNTUK MEWUJUDKAN KEINGINANNYA ITU, PEMERINTAH DAERAH TK I TIMOR TIMUR TELAH MENDORONG DPRD-DPRD TK II, ORSOSPOL DAN ORMAS MEMBUAT PERNYATAAN-PERNYATAAN MELAWAN GRPRTT.

SEKARANG, SETELAH BEBERAPA ORANG PENDIRI/PENGURUS GRPRTT YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPERIKSA OLEH ITWILPROP TIMOR TIMUR, TIBA GILIRAN PIHAK KEPOLISIAN MENGAMBIL INISIATIF UNTUK MEMULAI PEMERIKSAAN TERHADAP 7 (TUJUH) ORANG PENDIRI, DI ANTARANYA KEBANYAKAN ADALAH MEREKA YANG TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN DI INSPEKTORAT TADI.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMERIKSAAN TERHADAP BEBERAPA ORANG PENDIRI/PENGURUS GRPRTT TERSEBUT, MAKA KAMI SEGENAP PENDIRI/PENGURUS GRPRTT MEMANFAATKAN KESEMPATAN INI MENGHADAP BAPAK KAPOLDA TIMOR TIMUR DENGAN MAKSUD MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT :

1. KAMI MENOLAK DENGAN TEGAS UNTUK DIPERIKSA OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAN ATAU PIHAK PERADILAN INDONESIA MANAPUN DI TIMOR TIMUR, SEBAB KAMI TELAH DICAP ANTI-REPUBLIK INDONESIA OLEH GUBERNUR KDH TK I TIMOR TIMUR.
2. TANPA MEMPERKARAKAN KEDAULATAN INDONESIA ATAS TIMOR TIMUR, BERDASARKAN RESOLUSI PBB NOMOR: 32/34 DAN 37/30, KAMI MENUNTUT - KALAU BENAR-BENAR DIANGGAP BERSALAH - AGAR PEMERIKSAAN/HUKUMAN TERHADAP KAMI DAPAT DILAKUKAN OLEH SEBUAH BADAN PERADILAN INTERNASIONAL DI BAWAH PBB DEMI MENJAGA NETRALITAS/KEADILAN DALAM HASIL PEMERIKSAAN/HUKUMAN ITU.
3. KAMI MENUNTUT AGAR SEBELUM KAMI DIPERIKSA/DIHUKUM, PEMERINTAH INDONESIA DIMINTAI TANGGUNG JAWAB TERLEBIH DAHULU DAN SEMUA PENJAHAT PERANG YANG TELAH MENIMBULKAN HAMPIR TIGA RATUS RIBU ORANG TEWAS DI TIMOR TIMUR DIHUKUM.
4. KAMI MENUNTUT SEGERA DIADAKANNYA DIALOG LANGSUNG ANTARA RAKYAT TIMOR TIMUR (GEREJA, TOKOH-TOKOH PARTAI FRETILIN, UDT, APODETI, KOTA, TRABALHISTA, GMRT, CNRM, GRPRTT, FRONT PERLAWANAN BERSENJATA DLL) DENGAN PEMERINTAH INDONESIA, DAN PORTUGAL DI BAWAH NAUNGAN PBB, KARENA KAMI MEMANDANG PEMERINTAH DAERAH TK I DAN ABRI DI TIMOR TIMUR TIDAK MAMPU ATAU GAGAL MEREDAM BERBAGAI GEJOLAK SOSIAL, EKONOMI -

DAN POLITIK DI DAERAH INI, TERMASUK MASALAH GRPRTT.

4. KAMI MENUNTUT AGAR PEMERINTAH DAERAH TK I TIMOR TIMUR DAN ABRI SEGERA MENGHENTIKAN BERBAGAI MACAM REKAYASA YANG MENDORONG TIMBULNYA REAKSI NEGATIF TERHADAP GRPRTT DAN KONFLIK BARU DI TIMOR TIMUR.
5. KAMI MENUNTUT AGAR PEMERINTAH DAERAH TK I TIMOR TIMUR DAN APARAT KEAMANAN (ABRI) DI TIMOR TIMUR DAPAT MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMI PARA PENDIRI/PENGURUS, SIMPATISAN DAN PENDUKUNG GRPRTT DI MANAPUN IA BERADA DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI TIMOR TIMUR.

DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP INI, SEMOGA MENDAPAT PERHATIAN SEPERLUNYA.-

10/1-98

DILI, 10 JANUARI 1998.-

KAMI YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. Dra. Francisco Lopes de Carvalho
2. MANUEL V. CARRASCALÃO
3. Maria L.V.C. Quintão
4. João Pedro Soares
5. Helena D. Q. Monteiro
6. [illegible]
7. [illegible]
8. Paulo Pereira dos Santos
9. [illegible]
10. [illegible]
11. Armando Abel Dasi
12. [illegible]
13. Artur da Costa
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. José A. [illegible]
18. VICTOR DA COSTA